BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Biaya Tidak Terduga dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2020-2024, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

a) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang diproksikan dengan rasio kemandirian keuangan daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa PAD merupakan faktor yang paling dominan dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah melalui penguatan kapasitas fiskal dan pengurangan ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat.
b) Biaya Tidak Terduga tidak berpengaruh meskipun memiliki arah hubungan positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa Biaya Tidak Terduga lebih berperan sebagai instrumen stabilisasi fiskal dan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi kondisi darurat daripada sebagai faktor yang secara langsung meningkatkan kemandirian keuangan daerah.
c) Belanja Modal tidak berpengaruh meskipun memiliki arah hubungan negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa manfaat Belanja Modal terhadap peningkatan kemandirian keuangan daerah cenderung bersifat jangka panjang dan bergantung pada efektivitas pengelolaan serta pemanfaatan aset yang dihasilkan.

5.2 Saran

a) Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat disarankan untuk terus mengoptimalkan sumber-sumber PAD melalui peningkatan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah,

digitalisasi pelayanan perpajakan, serta pengembangan potensi ekonomi lokal. Upaya tersebut penting dilakukan karena PAD terbukti menjadi faktor yang paling dominan dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat.

b) Meskipun Biaya Tidak Terduga tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, pemerintah daerah tetap perlu mengelola BTT secara optimal sebagai instrumen stabilisasi fiskal. Pemerintah daerah disarankan untuk meningkatkan kualitas perencanaan risiko fiskal, memperkuat mekanisme penganggaran berbasis mitigasi risiko, serta memastikan penggunaan BTT dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel agar mampu menjaga stabilitas pelayanan publik ketika terjadi kondisi darurat maupun keadaan yang tidak terduga.

c) Meskipun Belanja Modal tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, pemerintah daerah disarankan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program Belanja Modal agar aset yang dibangun dapat memberikan manfaat ekonomi yang optimal. Selain itu, pemerintah daerah perlu memprioritaskan Belanja Modal yang memiliki nilai produktif dan mampu mendorong aktivitas ekonomi daerah sehingga dalam jangka panjang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan memperkuat kemandirian keuangan daerah.

d) Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan indikator kinerja keuangan pemerintah daerah yang lebih beragam, seperti rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian belanja, atau indikator kinerja keuangan lainnya agar mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi keuangan pemerintah daerah. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi

Hasil (DBH), pertumbuhan ekonomi, tingkat investasi, maupun ukuran pemerintah daerah. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk memperluas periode pengamatan dan cakupan wilayah penelitian sehingga dapat menghasilkan temuan yang lebih representatif serta memiliki tingkat generalisasi yang lebih luas.

e) Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah daerah tidak hanya perlu berfokus pada peningkatan besaran anggaran, tetapi juga pada penguatan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. Sementara itu, pengelolaan Biaya Tidak Terduga perlu diarahkan sebagai instrumen stabilisasi fiskal yang mampu menjaga ketahanan keuangan daerah ketika menghadapi kondisi darurat. Di sisi lain, Belanja Modal perlu difokuskan pada pembangunan aset yang produktif dan mampu menciptakan dampak ekonomi berkelanjutan sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan dari sisi pembangunan fisik, tetapi juga mampu meningkatkan kemandirian keuangan daerah pada masa yang akan datang.